

**PENDEKATAN DAN METODOLOGI
PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP)
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2007**

Oleh : Pujo Priyono^{)}*

Abstrak

Pendekatan Pelaksanaan Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 adalah PPME, yaitu suatu basis pendekatan yang mana Perencanaan dan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi yang partisipatif dan terintegratif.

Pelaksanaan PIIP di Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 ini menggunakan Sistem Manajemen Mutu Proyek dengan berbasis Pendekatan Tim, Pemberdayaan dan Kelompok. Juga, menggunakan metode Pelaksanaan yang berbasis pemasaran Sosial dan Penyadaran Publik baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, melalui pelatihan Fasilitator dan Komunitas.

Analisa Situasi dan Identifikasi masalah Program PIIP Lanjutan Tahun 2007 untuk kabupaten Bondowoso ini mengacu pada 'base line' pada program sebelumnya. Dan diperoleh strategi pendampingan untuk 82 desa dengan komposisi Fasilitator Teknis sebanyak 24 orang, dengan tiap 3 orang Fasilitator teknik akan membentuk tim dengan 1 orang Fasilitator Pemberdayaan.

Untuk mengetahui dampak dan manfaat langsung secara ekonomi dan terhadap pembangunan desa tertinggal, maka variabel-variabel di desa yang berkaitan dengan data kependudukan, infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, perilaku hidup bersih dan sehat, kondisi sosial, penerangan, transportasi dan informasi di skor per desa sasaran baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan PIIP tahun 2006/2007 sesuai dengan ketentuan statistik. Kesimpulan dapat diambil dengan membandingkan secara matematis jumlah total skor variabel (Indeks Komposit) sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Apabila \sum Skor sebelum < \sum Skor sesudahnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa tertinggal cukup berhasil.

Kata-kata kunci:

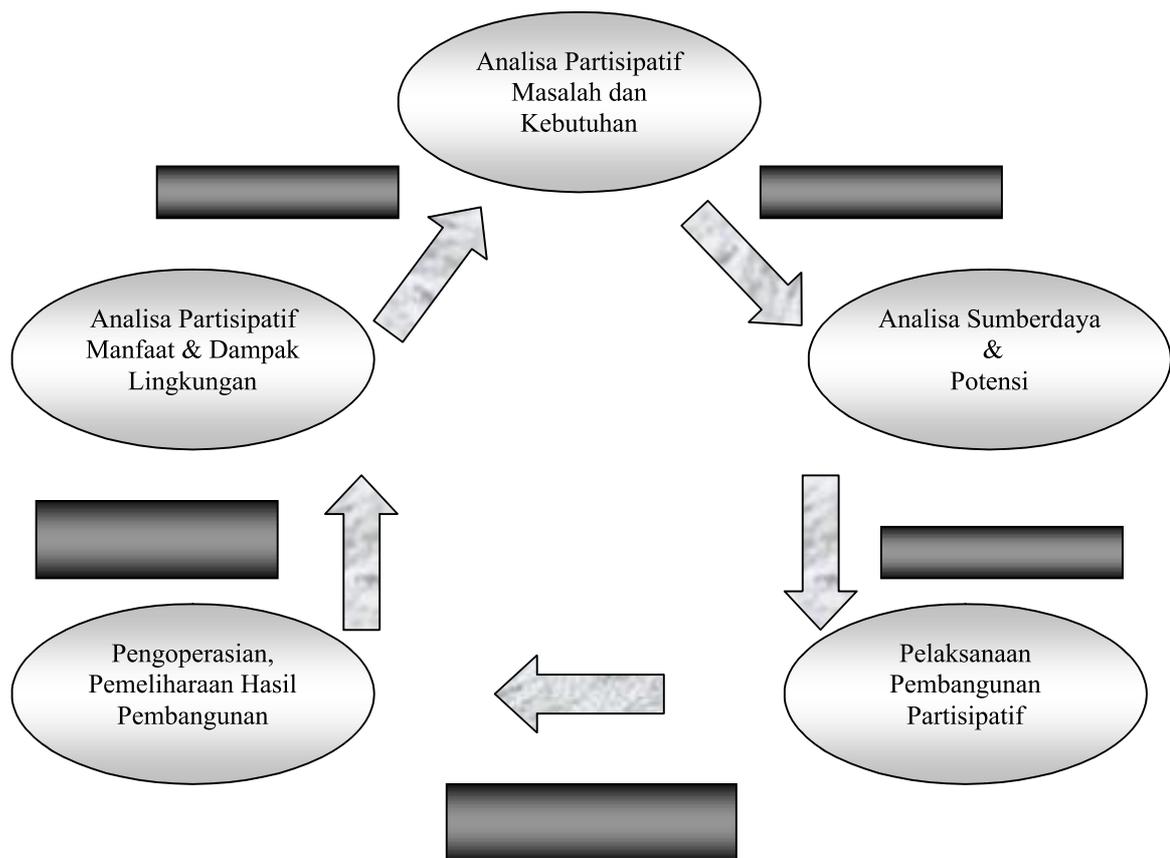
Pendekatan dan Metodologi, Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan, Manajemen Mutu Proyek, Fasilitator, Desa Tertinggal, Dampak dan manfaat langsung secara ekonomi.

PENDAHULUAN

PPME Sebagai Pendekatan Pelaksanaan Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Kabupaten Bondowoso.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah Program Pembangunan tidak terlepas dan sangat dipengaruhi oleh pendekatan apa yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program tersebut. Seperti diketahui bahwa Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) sama halnya dengan program-program pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*Community Based Development*) memakai pendekatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (Participative, Planning, Monitoring, and Evaluation/PPME).

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (PPME) (Gambar 1) merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang terintegratif. Semua pihak yang terlibat, seperti unit-unit pelaksana proyek di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Fasilitator, Pemerintahan Desa dan Stafnya serta pihak-pihak terkait lainnya bertanggungjawab untuk melakukan penilaian yang terus menerus terhadap seluruh proses pembangunan.



Gambar 1. Siklus perencanaan, Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan Pemantauan Serta Evaluasi Partisipatif

Kegiatan melalui Pendekatan PPME dapat dibagi menjadi 5 (lima) kegiatan utama yang partisipatif, Yaitu: (1) Perencanaan ;(2)Pelaksanaan ;(3)Monitoring dan Evaluasi ; (4)Operasi dan Pemeliharaan ; dan (5)Evaluasi Manfaat/Dampak Kegiatan.

Disamping itu beberapa kegiatan lain yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan PPME, yaitu: (1) Kampanye Kepedulian Publik (*Public Awareness Campaign*); (2) Pelatihan (*Training*) Fasilitator; (3)Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kegiatan.

TINJAUAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PROYEK

Sistem Manajemen Mutu Proyek Sebagai Pendekatan Pelaksanaan Tugas Konsultan.

Pelaksanaan program pembangunan pada hakekatnya adalah proses merubah sumberdaya tertentu secara terorganisir menjadi sebuah hasil pembangunan yang mantap sesuai dengan tujuan dan harapan-harapan awal. Pada sisi lain telah disadari bahwa pelaksanaan program pembangunan pada umumnya merupakan rangkaian mekanisme tugas atau kegiatan yang rumit, yang mengandung berbagai permasalahan yang cukup kompleks.

Dengan melihat permasalahan pelaksanaan program pembangunan yang cukup kompleks, memunculkan satu pertanyaan spesifik tentang bagaimana agar suatu

program pembangunan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tepat mutu dan tetap pada koridor tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, agar suatu tujuan program pembangunan dapat tercapai maka perlu memperhatikan ciri-ciri umum manajemen proyek, antara lain: (1) Tujuan, sasaran, harapan-harapan dan strategi proyek dinyatakan secara jelas dan terinci ;(2) Diperlukannya rencana kerja dan awal yang realistis ;(3) Diperlukannya kejelasan dan kesepakatan tentang peranan dan tanggungjawab diantara semua satuan organisasi dan individu yang terlibat dalam proyek untuk berbagai strata jabatan; (4) Diperlukan mekanisme untuk memonitor, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab pada berbagai strata organisasi; (5) Diperlukan mekanisme sistem evaluasi yang diharapkan dapat memberikan *feedback* bagi manajemen.;(6) Diperlukan tim proyek atau satuan organisasi proyek dapat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin harus bergerak di luar kerangka organisasi rutin, tetapi dengan tetap berorientasi pada tercapainya produktivitas;(7) Diperlukan pengertian dan pemahaman mengenai tata cara dan dasar-dasar peraturan birokrasi dan pengetahuan tentang tata cara mengatasi kendala birokrasi.

Sistem manajemen proyek dapat diartikan sebagai suatu set yang terdiri atas susunan terpadu dan konsep-konsep, dasar-dasar pengertian atau teknik-teknik penanganan yang saling berkaitan dalam kerangka manajemen. Jadi, bahwa untuk menangani pelaksanaan proyek dengan baik diperlukan pendekatan sistem manajemen proyek yang lengkap, mendasar, kokoh dan terpadu (integratif).

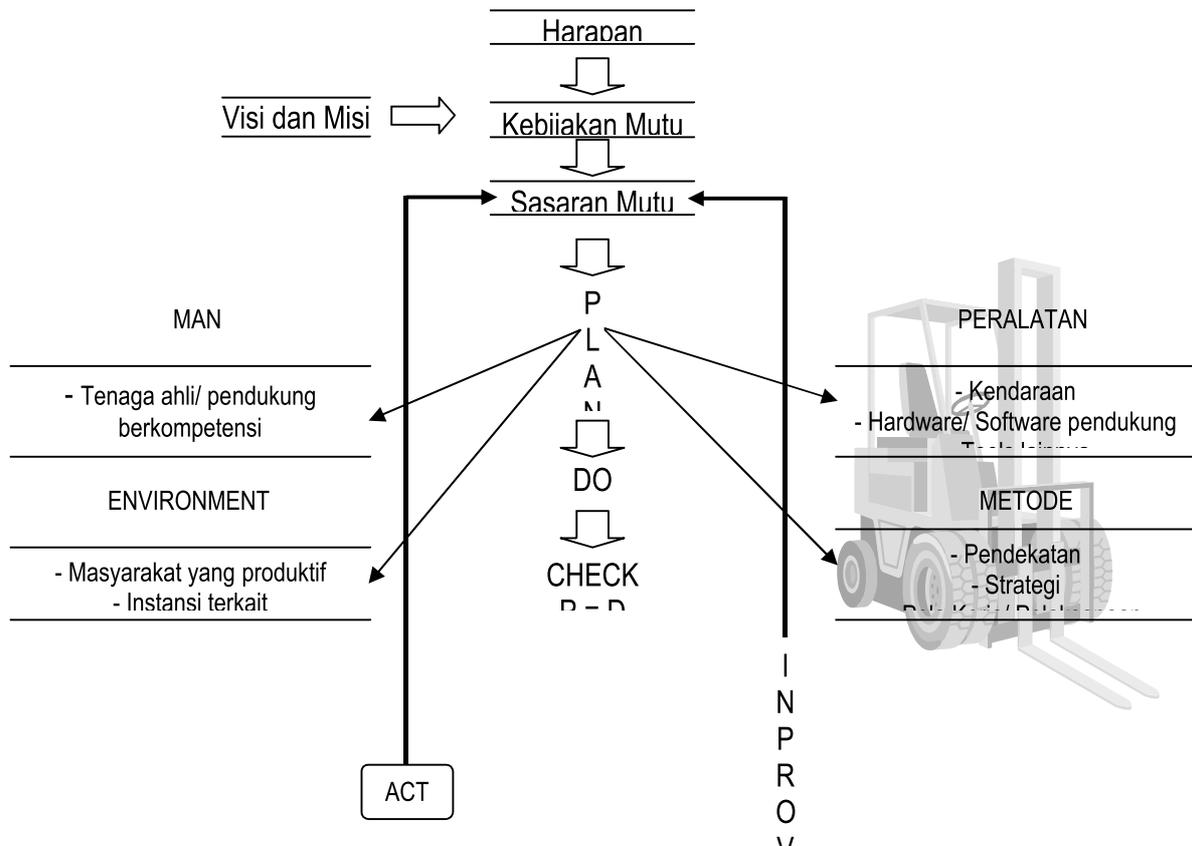
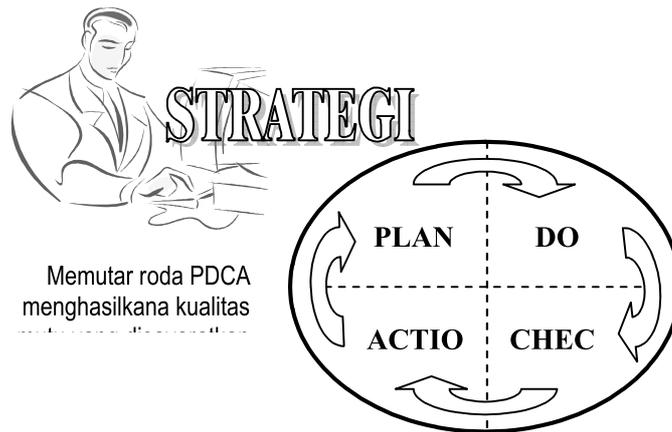
Dengan memperhatikan hal-hal di atas maka diperlukan adanya pendekatan Sistem Manajemen Mutu Proyek sebagai pendekatan pelaksanaan tugas konsultan menangani kegiatan sehingga mutu proyek yang memuaskan bagi *customer* atau *Stake Holders*(baik Pemerintah maupun Masyarakat).

Sistem manajemen mutu proyek (Gambar 2) adalah interaksi kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, harapan masyarakat melalui strategi manajemen yaitu memutar Roda PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) sesering mungkin, maka akan menghasilkan derajat mutu yang memenuhi syarat dengan menggunakan 8 prinsip manajemen mutu, yakni: Fokus Konsumen, Kepemimpinan, Pelibatan Orang, Pendekatan Proses, Pendekatan Sistem, Perbaikan kesinambungan, pendekatan fakta pengambilan keputusan, hubungan yang saling menguntungkan dengan *Stake holders*.

1. Pendekatan Tim Sebagai Landasan Keberhasilan Program

Pendekatan tim merupakan upaya membangkitkan komunikasi, mengurangi masalah dan mendorong keikutsertaan mereka yang peranannya sangat dibutuhkan demi keberhasilan Program peningkatan infrastruktur perdesaan (PPIP). Selain juga, dalam upaya menumbuhkan keserasian hubungan kerja yang solid diantara pengelola dan pelaksana kegiatan Program peningkatan infrastruktur perdesaan (PPIP)

Seluruh satuan organisasi ini harus mampu mewujudkan suatu kerjasama yang harmonis dan dinamis dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan sehingga mampu memberikan landasan kuat bagi keberhasilan program. Pendekatan ini hendaknya diterapkan sedini mungkin, sejak dimulainya kegiatan program dan secara berkesinambungan selama kegiatan program berlangsung.



Gambar 2. Strategi Sistem Manajemen Mutu Proyek

2. Pendekatan Partisipatif Pemberdayaan

Pendekatan yang memberdayakan pada hakekatnya adalah pendekatan yang menekankan proses pemberdayaan murni yang ditunjang dengan adanya partisipasi masyarakat. Dengan diterapkannya pendekatan ini diharapkan mampu menumbuhkan motivasi moril masyarakat untuk turut serta dalam setiap tahapan kegiatan. Partisipasi masyarakat yang menjadi tuntutan dalam pemakaian pendekatan tersebut di atas ialah: (1) Proaktif masyarakat dan tidak apatis; (2) Adanya kesepakatan yang dilakukan semua pihak yang terlibat; (3) Ada tindakan konkrit yang mengisi kesepakatan tersebut; (4) Ada pembagian wewenang dan tanggungjawab (*job discriptions*) yang setara/seimbang.

3. Pendekatan Yang Bertumpu Pada Kelompok

Pendekatan ini dilakukan karena adanya ikatan yang mempersatukan individu-individu dalam kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan tujuan, kegiatan dan domisili. Dimana tujuannya mengarah pada efisiensi, efektivitas dan mendorong peningkatan serta perkembangan kapital masyarakat.

Pemakaian pendekatan ini diharapkan dapat membangun dan meningkatkan fase komunikasi antar kelompok masyarakat menjadi lebih kondusif dan dinamis. Kegiatan kelompok masyarakat ini berkembang melalui peran swadaya yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan misalnya : Kejujuran, Dapat Dipercaya, Keikhlasan, Kebersamaan, Gotong-Royong, Dedikasi, dan Pengorbanan.

METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pemasaran Sosial Dan Penyadaran Publik

Kampanye penyadaran Publik tidak hanya terbatas pada tingkat desa saja, kegiatan ini meliputi Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Namun uraian berikut ini lebih menekankan pada kampanye penyadaran publik yang akan dilaksanakan oleh Konsultan dan Fasilitator Kecamatan (FK) di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Kampanye penyadaran publik dilakukan melalui upaya penyebaran informasi dan sosialisasi agar masyarakat mempunyai peluang untuk ikut berpartisipasi. Tujuan sosialisasi dan penyebaran informasi secara khusus adalah: (a) Memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. yang dapat mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat luas mengenai visi, misi, tujuan, nilai-nilai dasar dari kegiatan PPIP 2006/2007; (b) Memotivasi masyarakat untuk kembali memberikan dukungan dan partisipasinya dalam kegiatan PPIP ini; (c) Mendorong masyarakat, terutama warga desa sasaran untuk berusaha merubah pola pikir dan perilaku ke arah suatu budaya yang demokratis partisipatif, transparan dan bertanggungjawab.

Dengan bertambahnya pengetahuan dan adanya perubahan sikap dan perilaku masyarakat, dengan harapan akan tumbuh kontrol sosial dari masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan Program. Kegiatan kampanye penyadaran publik dilakukan pada sebelum dan selama kegiatan Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

Secara umum metode pemasaran sosial dan penyadaran publik yang dipergunakan dalam Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) adalah: (1) Komunikasi Interpersonal; dan (2) Komunikasi Interpose. Kedua metode tersebut dijalankan untuk mencapai hasil yang optimal. Masing-masing kegiatan senantiasa saling terkait dan disesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai.

Kegiatan pemasaran sosial dan penyadaran publik akan berhasil apabila tercipta satu bentuk komunikasi yang efektif artinya pesan yang disampaikan kepada khalayak dapat diserap dan dimengerti dengan baik. Efektivitas komunikasi dalam penyampaian informasi tergantung pada kredibilitas komunikator, metode dan cara penyampaian serta tingkat pendidikan masyarakat sebagai penerima informasi. Hal-hal yang perlu dilakukan seorang komunikator dalam pemasaran sosial dan penyadaran publik, adalah: (a) Menguasai materi yang akan disampaikan; (b) Menyiapkan sarana bantu untuk berkomunikasi (misal: buku/ modul, *slide*); (c) Memahami sistem sosial dimana proses komunikasi akan dilakukan dalam rangka menyampaikan informasi kepada

masyarakat; (d) Penyajian materi tidak terlalu verbalistis; (e) Menciptakan komunikasi dua arah (*andragogi method*) dan (f) Menggunakan bahasa yang cocok.

Dalam proses pemasaran sosial dan penyadaran publik, seorang pendamping masyarakat dituntut untuk menguasai teknik komunikasi sebagai kelengkapan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Teknik komunikasi yang harus dikuasai adalah: (a) Teknik Instruktif; (b) Teknik Persuasif dan (c) Teknik interaktif.

2. Kampanye

a. Kampanye di Wilayah Desa Sasaran

Kampanye penyadaran publik pada tingkat desa dapat menggunakan Metodologi komunikasi yang diadopsi dari PPME sebagai pendekatan yang dipakai. Pada tingkat Desa, kampanye penyadaran publik dilakukan dengan metode komunikasi lingkungan yang merupakan kombinasi dari pendekatan partisipatif, pendidikan orang dewasa (*andragogi*), media komunikasi pembangunan, pemasaran sosial serta kampanye media untuk memecahkan masalah.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan pada kampanye penyadaran di tingkat Desa Sasaran adalah: (a) Analisa situasi dan identifikasi masalah untuk mengetahui gambaran posisi dan arah program yang akan dijalankan, sehingga komunikator dapat memahami metode komunikasi yang akan digunakan dengan menggunakan pendekatan Analisis Lingkungan SWOT berdasarkan *baseline* guna memperoleh penggunaan strategi pengembangan/metode komunikasi yang lebih efektif daripada periode sebelumnya; (b) Analisa khalayak dan survei Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) dengan menggunakan teknik *dept interview*, RRA dan PRA yang berdasarkan daftar pertanyaan yang terstruktur; (c) Penetapan tujuan komunikasi; (d) Pengembangan strategi komunikasi; (e) Seleksi dan bauran Media; (f) Pengembangan pesan; (g) Pengembangan dan uji coba media; (h) Kinerja media dan implementasi lapangan

b. Kampanye di tingkat Kabupaten

Kegiatan penyebarluasan informasi secara lebih luas dapat dilakukan dengan Kampanye tingkat Kabupaten diharapkan dapat memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tingkat Desa. Kelompok yang dijadikan sasaran kampanye pada tingkat ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Umum. Adapun media yang dipergunakan pada Kampanye tingkat Kabupaten melalui: (a) Lokakarya Orientasi/Diseminasi; (b) Kampanye melalui berbagai event/kegiatan; (c) Kampanye radio; (d) Kampanye melalui bulletin

3. Metode pelatihan Fasilitator dan Komunitas

a. Pelatihan Fasilitator

Pelatihan Fasilitator dilakukan dengan menggunakan metode Pelatihan Bagi Orang Dewasa (POD), melalui kegiatan belajar mengajar di ruang kelas (*class room*), dinamika kelompok dan *Focussed Group Discussion* (FGD). Adapun jenis pelatihan Fasilitator adalah Pelatihan Manajemen Proyek (Administrasi Proyek dan Keuangan, Operasi Pemeliharaan dan Pemanfaatan prasarana, Sistem Informasi Manajemen, serta Kampanye kepedulian publik).

b. Pelatihan Komunitas

Metode yang akan dipergunakan dalam memberikan pelatihan bagi komunitas adalah metode pelatihan setempat (*on Job Training*) dan metode pelatihan tatap muka

(Class Room). Dimana seluruh kegiatan pelatihan ini dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Desa yang diselenggarakan di setiap Desa sasaran.

4. Metode Pengendalian dan Pengawasan Proyek

a. Monitoring

Pemantauan pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah kegiatan program sudah berjalan sesuai dengan rencana. Dalam arti, prinsip dan prosedur Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) sudah dilaksanakan dengan benar. Metode yang digunakan adalah: (a) Mengisi Form-form isian Sistem Informasi Manajemen (SIM). Form-form isian data input SIM yang telah disiapkan akan diberikan kepada berbagai pihak satuan organisasi mulai tingkat pengelola proyek (KPP, OMS, KD, FK, dsb) ; (b) Kunjungan Lapangan; (c) Pertemuan, Rapat, Koordinasi.

b. Evaluasi

Seperti halnya kegiatan monitoring, kegiatan Evaluasi juga dilakukan pada setiap tingkatan pengelola dan pelaksana proyek sebagaimana uraian sebagai berikut : (a) Pada tingkat pengelola proyek yang dilakukan dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan indikator dan tolok ukur yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui berbagai kegiatan rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin. (b) Sedangkan kegiatan Evaluasi pada tingkat pelaksana proyek (Masyarakat) dilakukan secara partisipatif, dimana warga masyarakat dapat menilai kinerja pelaksanaan melalui mekanisme Musyawarah Desa.

5. Metode Sistem Informasi Manajemen

Secara umum pelaporan pelaksanaan Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) disiapkan oleh masing-masing satuan organisasi yang terlibat di dalam pelaksanaan mulai tingkat pelaksana hingga pengelola proyek.

a. Laporan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK)

Laporan yang harus disiapkan oleh KMK antara lain: (a) Laporan Pendahuluan; (b) Laporan Bulanan; (c) Laporan Rakor/Mingguan/Insidental; (d) Laporan Akhir; (e) Laporan Rekapitulasi masalah dan tindak lanjut di tingkat Kabupaten.

1) Laporan Fasilitator

Laporan fasilitator terdiri atas: (a) Laporan pemantauan partisipasi masyarakat dalam setiap siklus kegiatan Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) setiap bulan dan (b) Laporan rekapitulasi permasalahan tingkat desa dan kecamatan

2) Laporan OMS/LKD/Pokmas

Laporan OMS/Pokmas/LKD yang berkenaan dengan Pelaksanaan Kegiatan, antara lain: (a) Laporan Catatan Harian Kegiatan; (b) Laporan Daftar Hadir Pekerja harian dan penerimaan insentif; (c) Laporan Penggunaan Material; (d) Buku Bimbingan yang diisi oleh Pendamping; (e) Buku Tamu; (f) Laporan Mingguan Prestasi Pekerjaan, Kemajuan Pelaksanaan, yang diperiksa oleh Fasilitator dan Tim Kecamatan; (g) Laporan Rekapitulasi Bulanan Kemajuan Pelaksanaan, diperiksa oleh Fasilitator dan Tim Kecamatan; (h) Laporan masalah yang dihadapi di tingkat desa; (i) Laporan Realisasi Kegiatan Dan Biaya; (j) Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K);

(k) Surat Pernyataan Menyelesaikan Pekerjaan (SPMP); (l) Surat Penyelesaian Pekerjaan (SPP); (m) Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan

6. Metode dan Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pelaksanaan suatu proyek tidak pernah terlepas dari permasalahan, baik yang disebabkan adanya konflik/friksi maupun pelanggaran prosedur pelaksanaan. Untuk mengatasi terjadinya permasalahan tersebut, perlu dibentuk Unit Pelayanan Pengaduan di tingkat Komunitas hingga Pusat.

Pengaduan dapat berasal dari Perorangan atau Organisasi Masyarakat. Setiap pengaduan yang dilakukan Perorangan maupun Masyarakat perlu dicatat, hal ini untuk menjamin kesinambungan informasi serta penanganan pengaduan. Pengaduan dapat dilakukan dengan cara menyampaikan Surat melalui Kotak Pos, berita langsung (*call center*, sms center) kepada pejabat pelaksana pengawasan struktural maupun pelaksana pengawasan fungsional (UPM, TKP, KD, FK, KMK, KMP, KMPr, KMP).

Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat harus segera ditindak lanjuti. Penanganan pengaduan dan permasalahan dilakukan secara berjenjang sesuai porsi kewenangan pihak struktural terkait munculnya masalah, pengaduan yang belum terselesaikan, maka penanganan diserahkan pada jenjang struktural yang lebih tinggi.

ANALISA

a. Analisa Situasi dan Identifikasi Masalah Program Lanjutan

Analisa ini berangkat dari kondisi awal (*baseline*) perkembangan terakhir (*progress report*) program periode sebelumnya.

Dalam analisis ini terdiri dari beberapa indikator/instrumen kegiatan sebagai tolok ukur (*base line*) keberhasilan PPIP periode tahun 2006 (tabel 1):

b. Baseline dan Pendekatan Manajemen Kabupaten

Baseline Kegiatan

Tabel 1. Tabel Indikator Kegiatan dan *Base line* nya

No.	Indikator Kegiatan / Instrument	Baseline	Bulan I	Bulan II
1.	Laporan Catatan Harian Kegiatan	89%	100%	100%
2.	Laporan Daftar Hadir Pekerja harian dan penerimaan insentif	89%	100%	100%
3.	Laporan Penggunaan Material	89%	100%	100%
4.	Buku Bimbingan yang diisi oleh Pendamping	89%	100%	100%
5.	Buku Tamu	100%	100%	100%
6.	Laporan Mingguan Prestasi Pekerjaan	89%	100%	100%
7.	Rata-Rata Kemajuan Pelaksanaan <i>Progress Report</i> yang diperiksa oleh Fasilitator dan Tim Kecamatan	81.21%	92.50%	100%
8.	Laporan Rekapitulasi Bulanan Kemajuan Pelaksanaan yang diperiksa oleh Fasilitator dan Tim Kecamatan	45%	60%	100%
9.	Laporan masalah yang dihadapi di tingkat desa	89%	100%	100%
10.	Laporan Realisasi Kegiatan dan Biaya termasuk Buku Kas Umum (BKU)	43.90%	75%	100%
11.	Pelatihan/Pembekalan/Asistensi/Konsultasi/Fasilitasi terhadap KPP oleh FK tentang Penyerahan sarana dan prasarana yang telah terbangun	0%	50%	100%
12.	Pelatihan/Pembekalan/Asistensi/Konsultasi/Fasilitasi terhadap FK oleh Konsultan tentang Kegiatan	0%	50%	100%

	Pemanfaatan & Pemeliharaan dan Identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana dasar			
13.	Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Oleh OMS/LKD/Pokmas kepada Masyarakat	0%	60%	100%
14.	Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)	0%	75%	100%
15.	Surat Pernyataan Menyelesaikan Pekerjaan (SPMP)	0%	75%	100%
16.	Surat Penyelesaian Pekerjaan (SPP)	0%	75%	100%
17.	Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan	0%	75%	100%
18.	Jumlah Desa dengan Pelaksanaan Fisik = 100%	36 Desa	68 Desa	82 Desa
19.	Jumlah Desa dengan pelaksanaan Fisik < 100%	46 Desa	14 Desa	0 Desa
20.	Jumlah FK Teknik	16	24	24
21.	Jumlah FK Pemberdayaan	12	8	8
22.	Evaluasi kemanfaatan prasarana dan sarana, manfaat ekonomi secara langsung dan dampaknya terhadap pembangunan desa tertinggal	0%	60%	100%

Berdasarkan kondisi obyektif *baseline* kegiatan di atas maka ada beberapa pola strategi pendampingan konsultan terhadap desa sasaran, sehingga proses pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat berjalan dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat pada koridor tujuan yang ingin dicapai.

Adapun strategi pendampingan yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

1) Penguatan Kombinasi Personal FK

Metode pendekatan ini bertujuan merevisi Tim FK pada setiap kecamatan periode sebelumnya baik secara kuantitas maupun kualitas terutama lebih difokuskan pada FK teknik yang dinilai memiliki kinerja kurang sesuai, sedangkan FK Pemberdayaan relatif tetap walaupun secara kuantitas ada kecenderungan untuk dikurangi jumlahnya. Apabila dalam satu lokasi sasaran terdapat pekerjaan fisik belum selesai maka kecenderungan FK Teknik diganti dengan yang baru ataupun diputar ke lokasi lain. Selanjutnya di lokasi sasaran tersebut ditempatkan FK Teknik yang memiliki kinerja dan akuntabilitas lebih baik daripada sebelumnya.

Apabila pekerjaan fisik sudah selesai dan secara administratif belum selesai, maka FK pemberdayaan dapat didorong baik secara persuasif maupun instruktif dalam upaya mendampingi OMS dan Kader Desa agar segera dapat menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Upaya mempertahankan FK Pemberdayaan ini terutama pada lokasi sasaran sebelumnya karena mengingat lama waktu pendampingan hanya dua bulan, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan adaptasi baru terutama lokasi dimaksud memiliki faktor sosio kultural yang masif. Kecuali terdapat desa sasaran yang kondisinya kurang kondusif dengan kata lain potensi konfliknya cukup besar, maka penempatan FK Pemberdayaan baru yang lebih kuat menjadi amat penting dan juga didukung oleh Asisten Ahli Teknik yang relatif kuat di bidang Pemberdayaan. Secara terperinci mengenai jumlah dan kombinasi FK di Kabupaten Bondowoso dapat disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah dan Kombinasi Fasilitator

No.	Fasilitator Kecamatan	Jumlah Desa Dampingan (Buah)	Jumlah Komunitas FK (Orang)	Keterangan
1.	FK Teknis :			
	a. Komunitas A	3	14	Lama/Baru
	b. Komunitas B	4	10	Lama

2.	FK Pemberdayaan :			
	a. Komunitas A	10	7	Lama
	b. Komunitas B	12	1	Lama

Rasio kombinasi di Kabupaten Bondowoso seperti yang tampak pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa *progress report* untuk pekerjaan fisik masih belum tuntas secara signifikan. Artinya bahwa hanya 36 desa sasaran (43.90%) yang telah selesai fisiknya dan selebihnya rata-rata mencapai kurang dari 72%. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : (a) Ketersediaan sumberdaya lokal relatif terbatas; (b) Dana Termin III (20%) belum cair dan OMS kesulitan untuk memperoleh dana talangan; (c) Tingkat partisipasi masyarakat relatif kecil dalam konteks material dan juga inmaterial; (d) Kondisi cuaca yang kurang kondusif seringkali terjadi *Force Major*. Selain itu, dengan turunnya hujan seringkali mendorong pekerjaan di lapangan memakan waktu lebih dari yang direncanakan; (e) Faktor geografis desa sasaran dengan medan fisik yang berat; (f) Terbatasnya peralatan pendukung pekerjaan seperti wales, molen dan lain-lain; (g) Secara non teknis bahwa munculnya lembaga independent seperti komunitas LSM dan mass media sebagai salah satu bagian lembaga eksternal yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara empirik seringkali menimbulkan kegelisahan bagi pengelola program pada setiap tingkatan; (h) Intervensi pihak di luar pengelola program seperti keterlibatan Kepala Desa/Perangkat Desa dan atau BPD di luar kewenangannya seringkali mengganggu kinerja OMS dan KD secara teknis.

2) Penguatan Kombinasi Wilayah Lokasi Sasaran

Penugasan FK di setiap wilayah Kecamatan dan Desa memperhatikan banyak aspek sosial ekonomi budaya misalnya desa sasaran baik secara fisik dan administrasi belum selesai akan ditugaskan FK dengan kapasitas FK yang relatif kuat. Apalagi kondisi geografis cukup berat, kondisi ekonomi di bawah rata-rata desa sekitar (desa sangat tertinggal), rata-rata tingkat pendidikan penduduknya rendah dan potensi konflik horizontal dan vertikal cukup besar.

Pola kombinasi ini menjadi pilihan utama atas pertimbangan alternatif lainnya walaupun secara geografis posisi desa sasaran yang didampingi Tim FK terpencar dan secara administratif terpisah atas wilayah kecamatan. Tugas berat yang harus diemban oleh Tim FK dengan kondisi ini terutama pada finishing pekerjaan fisik dan fasilitasi Musdes Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan oleh OMS kepada warga Masyarakat serta penyelesaian administrasi proyek.

Sementara itu, tugas Tim FK pada akhir pelaksanaan kegiatan program lanjutan tahun 2007 ini adalah melakukan proses evaluasi kemanfaatan prasarana dan sarana terbangun seperti dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat dan dampaknya terhadap pembangunan desa tertinggal. Adapun manfaat dan dampak dimaksud akan diukur dengan kriteria yang lazim digunakan oleh lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan lembaga internasional seperti World Bank, FAO, dan ADB serta termasuk oleh para Pakar Kemiskinan dalam dan luar negeri. Kriteria tersebut antara lain berupa variabel Lembaga kemasyarakatan desa (Kepala Desa, LKMD/LPM, BPD dan *Stake Holders* Lokal); Jalan Utama Desa; Lapangan Usaha Mayoritas Penduduk; Rata-rata Pertanian yang Diusahakan per Rumah Tangga Pertanian; Jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan; Fasilitas Pendidikan; Fasilitas Pendidikan; Tenaga Kesehatan yang Tinggal di Desa; Sarana Komunikasi; Pasar Permanen Desa;

Kepadatan Penduduk; ketersediaan air bersih; wabah penyakit dalam setahun; sumber bahan bakar penduduk; cara pembuangan sampah; jenis jamban; persentase rumah tangga pengguna listrik; persentase rumah tangga yang menyekolahkan anak; persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan roda empat; keadaan sosial ekonomi penduduk; kemudahan mencapai puskesmas; persentase rumah tangga yang memiliki televisi; kemudahan mencapai kelompok pertokoan; persentase rumah tangga yang memiliki telepon; kegiatan sosial budaya penduduk; persentase rumah tangga pertanian; dan angkutan penduduk.

Guna mengetahui dampak dan manfaat langsung secara ekonomi dan terhadap pembangunan desa tertinggal, maka masing-masing variabel tersebut diberi skor per desa baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan PPIP tahun 2006/2007 sesuai dengan ketentuan statistik. Kesimpulan dapat diambil dengan membandingkan secara matematis jumlah total skor variabel (Indeks Komposit) sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Apabila \sum Skor sebelum $<$ \sum Skor sesudahnya, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa tertinggal cukup berhasil. Akan tetapi perbedaan tersebut belum tentu signifikan pada tingkat kepercayaan tertentu apabila diuji secara statistik. Selanjutnya untuk lebih mengidentifikasi apakah desa sasaran tersebut benar-benar tergolong berhasil dalam upaya pembangunan desa tertinggal, maka total skor desa dibandingkan dengan standar tertentu yang didasarkan kepada nilai ukuran standar deviasi dan nilai range Propinsi Jawa Timur. Kesimpulannya adalah apabila nilai dari dua diantara tiga kriteria (standar deviasi, range dan persepsi lapang) di bawah nilai propinsi Jawa Timur, maka dikatakan bahwa desa tersebut tergolong desa miskin/tertinggal dengan kata lain bahwa dampak PPIP tahun 2006-2007 terhadap pembangunan desa tertinggal kurang berhasil karena belum dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk secara signifikan. Sebab standar ukuran baku dari sebuah konsep kemiskinan adalah pengeluaran atau pendapatan penduduk per kapita per bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Acuan Kerja Konsultan Manajemen Kabupaten Tahap Lanjutan (2007). Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya SNVT Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Provinsi Jawa Timur. Surabaya.

Pedoman Pelaksanaan Program PIP (2006). Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.

Pedoman Umum Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) (2006) . Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta. **Kerangka**

Laporan Akhir KMK Wilayah 2 Program PIP (2006). PT. Surya Abadi . Surabaya

**) Pujo Priyono, Dosen Jurusan Teknik Sipil FT-UM Jember*